

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 69 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang dipilih secara *purposive sampling*. Rincian jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1

**Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Total
1	Pemerintah kabupaten / kota yang terdaftar pada Tahun 2014	508
2	Pemerintah kabupaten / kota yang belum menyusun LKPD tahun 2014 dan belum diaudit BPK	(38)
3	Pemerintah kabupaten/kota yang tidak mengalami <i>audit delay</i>	(401)
4	Jumlah outlier	5
	Jumlah Sampel	54

Berdasarkan tabel 4.1 total pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014 berjumlah 508. Namun, berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan peneliti terdapat 69 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil penelitian ini setelah diolah ternyata terdapat 5 *outlier*. Sehingga hasil akhir sampel penelitian berjumlah 64 sampel.

## B. Uji Kualitas Instrumen Dan Data

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar deviation) dari variabel independen dan variabel dependen. Berikut adalah hasil statistik deskriptif penelitian ini:

**Tabel 4.2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AUD	64	1	33	16,84	10,105
SIZE	64	25,31	29,83	28,0567	,74835
MDR	64	,01	,95	,0778	,11695
TMN	64	4	32	14,73	5,541
OPAUD	64	0	1	,23	,427
JML_ET	64	18	151	52,12	25,818
Valid N (listwise)	64				

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 64 sampel. Variabel AUD (Audit *Delay*), sebagai variabel dependen memiliki rata-rata waktu 16,84 hari, waktu paling cepat adalah 1 hari sedangkan waktu paling lama adalah 33 hari dengan standar deviasi sebesar 10,10.

Variabel independen penelitian ini terdiri dari SIZE, MDR, TMN, OPAUD, dan JML\_ET. Variabel pertama yaitu SIZE (Ukuran Pemerintah Daerah) berkisar antara minimum 25,3 hingga maksimum 29,8 dengan nilai rata-rata sebesar 28,057 dengan standar deviasi 0,7484. Variabel MDR (Kemandirian Daerah) memiliki nilai

minimum sebesar 0,01 hingga nilai maksimum 0,95 dengan standar deviasi 0,11695. Variabel TMN (Jumlah Temuan Audit) memiliki jumlah temuan paling sedikit sebesar 4 kasus dan temuan terbanyak sebesar 32 kasus dengan rata-rata 14,73 kasus dan standar deviasi 5,541. Variabel OPAUD (Opini Audit) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,59 dengan nilai minimum sebesar 0 nilai maksimum sebesar 1, dan standar deviasi 0,427. Variabel JML\_ET (Jumlah Entitas Akuntansi) memiliki nilai minimum sebesar 18 entitas hingga nilai maksimum 151 entitas dengan rata-rata sebesar 52,12 dan standar deviasi 25,818.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas

### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui tingkat distribusi normal variabel yang digunakan dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan adalah One-Sample Kolmogorov Smirnov Test. Berikut adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.3**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,75933849
Most Extreme Differences	Absolute	,081
	Positive	,073
	Negative	-,081
Test Statistic		,081
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji K-S Uji K-S yang menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* di atas lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 0,200.

#### b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji ini dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *Tolerance*, dimana jika nilai  $VIF < 10$  dan nilai  $Tolerance > 0,10$  maka tidak terjadi masalah multikolinieritas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.4**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	68,288	48,328		1,413	,163		
SIZE	-1,773	1,728	-,131	-1,026	,309	,791	1,264
MDR	-16,538	9,872	-,191	-1,675	,099	,992	1,008
TMN	-,323	,237	-,177	-1,365	,178	,770	1,299
OPAUD	9,639	2,991	,407	3,223	,002	,811	1,233
JML_ET	,040	,050	,103	,795	,430	,778	1,285

a. Dependent Variable: AUD

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa kelima variabel independen tidak memiliki masalah multikolinearitas karena memiliki nilai *tolerance*  $> 0,1$  dan nilai  $VIF < 10$ . Maka

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas antar variabel independen.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini dilakukan dengan uji *Glejser* yaitu dengan meregres variabel independen dengan *absolute residual*. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini:

**Tabel 4.5**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-16,850	25,810		-,653	,516
SIZE	,941	,923	,147	1,020	,312
MDR	-2,158	5,272	-,053	-,409	,684
TMN	-,103	,126	-,119	-,812	,420
OPAUD	-1,452	1,597	-,130	-,909	,367
JML_ET	-,005	,027	-,025	-,172	,864

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa model penelitian yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dapat dilihat dari signifikansi variabel SIZE (Ukuran Pemerintah Daerah), MDR (Kemandirian Daerah), TMN (Jumlah Temuan Audit), OPAUD (Opini Audit), dan JML\_ET (Jumlah Entitas Akuntansi) diatas 0,05.

## C. HASIL PENELITIAN (UJI HIPOTESIS)

### 1. Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

**Tabel 4.6**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,499 <sup>a</sup>	,249	,184	9,129

a. Predictors: (Constant), JML\_ET, MDR, OPAUD, SIZE, TMN

Berdasarkan tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa besarnya koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) adalah 0,184 atau 18,4%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen SIZE (Ukuran Pemerintah Daerah), MDR (Kemandirian Daerah), TMN (Jumlah Temuan Audit), OPAUD (Opini Audit), dan JML\_ET (Jumlah Entitas Akuntansi) dapat menjelaskan variabel dependen AUD (Audit *Delay*) sebesar 18,4% dan sisanya 81,6% (100%-18,4%) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

### 2. Uji signifikansi simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikan simultan (Uji F) ditunjukkan pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1598,699	5	319,740	3,837	,005 <sup>b</sup>
	Residual	4833,739	58	83,340		
	Total	6432,438	63			

a. Dependent Variable: AUD

b. Predictors: (Constant), JML\_ET, MDR, OPAUD, SIZE, TMN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 3,837 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,005 < \alpha (0,05)$ . Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah, kemandirian daerah, temuan audit, opini audit, dan jumlah entitas akuntansi secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu audit *delay*.

### 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan guna mengetahui pengaruh signifikansi masing-masing variabel independen yang terdiri dari ukuran pemerintah, tingkat kemandirian daerah, temuan auditor, opini auditor, dan entitas akuntansi terhadap variabel dependen yaitu audit *delay* dalam persamaan regresi.

**Tabel 4.8**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	68,288	48,328		1,413	,163		
SIZE	-1,773	1,728	-,131	-1,026	,309	,791	1,264
MDR	-16,538	9,872	-,191	-1,675	,099	,992	1,008
TMN	-,323	,237	-,177	-1,365	,178	,770	1,299
OPAUD	9,639	2,991	,407	3,223	,002	,811	1,233
JML_ET	,040	,050	,103	,795	,430	,778	1,285

a. Dependent Variable: AUD

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$\text{AUD} = 68,288 - 1,773 \text{ SIZE} - 16,538 \text{ MDR} - 0,323 \text{ TMN} + 9,639 \text{ OPAUD} + 0,40 \text{ JML\_ET} + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda menggunakan uji parsial (uji t) yang dilakukan dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara sebagai berikut :

a. Hasil Uji Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji parsial yang di tunjukkan Tabel 4.8, variabel ukuran pemerintah (SIZE) memiliki koefisiensi regresi sebesar  $-1,773$  dengan nilai signifikansi  $0,309 > \alpha(0,05)$ , maka dapat diartikan bahwa Ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian untuk Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap *audit delay* **ditolak**.

b. Hasil Uji Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji parsial yang di tunjukkan Tabel 4.8, variabel kemandirian daerah (MDR) memiliki koefisiensi regresi sebesar  $-16,538$  dengan nilai signifikansi  $0,099 > \alpha(0,05)$ , maka dapat diartikan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian untuk Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang



menyatakan kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap audit *delay* **ditolak**.

c. Hasil Uji Hipotesis 3

Berdasarkan hasil uji parsial yang di tunjukkan Tabel 4.8, variabel temuan audit (TMN) memiliki koefisiensi regresi sebesar  $-0,323$  dengan nilai signifikansi  $0,178 > \alpha(0,05)$ , maka dapat diartikan bahwa maka dapat diartikan temuan audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Dengan demikian untuk Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan temuan audit berpengaruh positif terhadap audit *delay* **ditolak**.

d. Hasil Uji Hipotesis 4

Berdasarkan hasil uji parsial yang di tunjukkan Tabel 4.8, variabel opini audit (OPAUD) memiliki koefisiensi regresi sebesar  $9,639$  dengan nilai signifikansi  $0,002 < \alpha(0,05)$ , maka dapat diartikan bahwa maka dapat diartikan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay. Dengan demikian untuk Hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan opini audit berpengaruh positif terhadap audit *delay* **diterima**.

e. Hasil Uji Hipotesis 5

Berdasarkan hasil uji parsial yang di tunjukkan Tabel 4.8,

variabel jumlah entitas akuntansi (JML\_ET) memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,40 dengan nilai signifikansi  $0,430 > \alpha(0,05)$ , maka dapat diartikan bahwa maka dapat diartikan bahwa jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap audit delay. Dengan demikian untuk Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan jumlah entitas akuntansi berpengaruh positif terhadap audit *delay* **ditolak**.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay**

Uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini dibuktikan dari hasil regresi yang menunjukkan koefisiensi regresi sebesar  $-1,773$  dengan nilai signifikansi  $0,309 > \alpha(0,05)$ . Sehingga Hipotesis pertama yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap audit *delay* ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Itsniawan dan Suranta (2015), fachrurozi (2014) dan Muladi (2014) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan Boyton dan Kell (1996) dalam Halim (2000) menyatakan bahwa suatu entitas yang besar maka cakupan audit yang dilakukan akan semakin besar sehingga akan mempengaruhi lamanya audit delay. Namun penelitian tersebut

biasanya dilakukan pada sektor swasta dan pada pemerintahan di luar negeri dimana audit di pemerintah daerah dilakukan oleh KAP yang memiliki fleksibilitas waktu audit. Hal tersebut berbeda dengan audit pada pemerintah daerah di Indonesia, dimana hasil audit yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan paling lambat dua bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sehingga hal itu dapat mempengaruhi auditor BPK untuk melaksanakan audit secara tepat waktu (Itsniawan dan Suranta, 2015).

## **2. Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Audit *Delay***

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini dibuktikan dari hasil regresi yang menunjukkan koefisiensi regresi sebesar  $-16,538$  dengan nilai signifikansi  $0,099 > \alpha(0,05)$ . Sehingga Hipotesis kedua yang menyatakan kemandirian daerah berpengaruh negatif terhadap audit *delay* ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Cohen dan Laventis (2012) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini mengindikasikan bahwa peran kemandirian daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah yang nantinya akan berdampak pada kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga audit *delay* dapat diminimalisir belum dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Menurut Rozai dan Subagyo (2015) Hal ini dimungkinkan karena baik

pemerintah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi maupun rendah dalam pelaksanaan anggaran belanja biasanya cenderung sama yaitu rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun (Rozai dan Subagyo, 2015). Dengan menumpuknya pelaksanaan anggaran di akhir tahun ini secara tidak langsung akan mempengaruhi penyampaian laporan keuangan, sehingga baik pemerintah daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi maupun rendah dapat sama-sama melakukan keterlambatan penyampaian laporan audit yang nantinya akan dapat berdampak pada terjadinya audit *delay*.

### **3. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Audit *Delay***

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hasil ini dibuktikan dari hasil regresi yang menunjukkan koefisiensi regresi sebesar  $-0,323$  dengan nilai signifikansi  $0,178 > \alpha(0,05)$ . Sehingga Hipotesis ketiga yang menyatakan temuan audit berpengaruh positif terhadap audit *delay* ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2014), selain itu penelitian Andriani (2012) juga mendukung hal tersebut. Menurut Andriani (2012), hal ini kemungkinan besar dapat terjadi dikarenakan pengukuran variabel temuan hanya menggunakan jumlah kasus dalam temuan audit saja. Jumlah kasus dalam temuan audit ini dapat tidak mempresentasikan angka sebenarnya, karena jumlah temuan yang banyak belum tentu nilainya material. Sehingga

meskipun jumlah kasus temuan audit banyak namun terdapat beberapa kasus yang dimungkinkan nilainya tidak material bagi pemerintahan tersebut, maka prosedur tambahan yang perlu dilakukan oleh auditor tidak terlalu kompleks sehingga audit *delay* dapat terminimalisir.

#### **4. Pengaruh Opini Audit Daerah Terhadap Audit Delay**

Uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay. Hasil ini dibuktikan dari hasil regresi yang menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 9,639 dengan nilai signifikansi  $0,002 < \alpha(0,05)$ . Sehingga Hipotesis keempat yang menyatakan opini audit berpengaruh positif terhadap audit *delay* diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muladi (2012) dan Armansyah dan Kurnia (2012) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay, artinya audit delay akan relatif lama pada pemerintah daerah yang mendapat opini selain. Menurut Payne dan Jensen (2002) Hal ini dapat terjadi karena pada opini selain *unqualified opinion* seperti opini *qualified opinion* yang diberikan, mengindikasikan selama proses pemeriksaan laporan keuangan, auditor melakukan prosedur tambahan. Sedangkan pemerintah daerah yang mendapatkan *unqualified opinion* dapat menekan terjadinya audit delay karena auditor telah yakin bahwa daerah telah melaksanakan akuntansinya secara baik sehingga prosedur tambahan tidak dibutuhkan.

## 5. Pengaruh Jumlah Entitas Akuntansi Terhadap Audit Delay

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap audit *delay*. Hasil ini dibuktikan dari hasil regresi yang menunjukkan koefisiensi regresi sebesar 0,40 dengan nilai signifikansi  $0,430 > \alpha(0,05)$  Sehingga Hipotesis kelima yang menyatakan jumlah entitas akuntansi berpengaruh positif terhadap audit *delay* ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil yang di dapat oleh fachrurozi (2014) dan Itsniawan dan Suranta (2015) bahwa jumlah entitas akuntansi tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurut Itsniawan dan Suranta (2015) hal ini terjadi karena semakin sedikit jumlah entitas akuntansi yang dimiliki pemerintah daerah tidak selalu berdampak pada terminimalisirnya audit delay. Jumlah entitas yang sedikit juga dapat mengakibatkan beban pada tiap entitas menjadi lebih berat sehingga dalam pelaporannya entitas tersebut menjadi kurang efektif.